



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pengelolaan keuangan daerah, perlu menyusun pedoman pengelolannya sehingga tercipta kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

11. Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah LN 2004 No.90 TMLN 4416, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan dengan PP Nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ke tiga atas PP nomor 24 tahun 2004. Tentang Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD LN th 2007 no 47 TMLN 4712.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Permendagri nomor 4 tahun 2008 tentang Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, bupati/wakil bupati, dan SKPD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran Khusus/Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus adalah Bendahara yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD/SKPD.
25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku bendahara umum daerah.
36. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang berkenaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

39. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
41. Sasaran target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
42. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
43. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah oleh bupati yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
45. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
46. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
47. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
48. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
49. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
50. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
51. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

52. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
54. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
55. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
56. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
57. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
59. Sistem pengendalian intern keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
60. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
61. Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku bendahara umum Daerah.

62. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
63. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
66. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
67. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
68. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dari uang persediaan.
69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayar tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

71. SPJ adalah Surat Pertanggung Jawaban.
72. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
73. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
74. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
75. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
76. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
77. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
78. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
79. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

80. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
81. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Asas Umum

Pasal 3

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan per undang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator pengelola keuangan daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsi selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - n. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul PPKD.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Selain Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lain di lingkungan SKPKD.
- (6) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD/PPKD.
- (7) Kedudukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pejabat 1 (satu) tingkat di bawah kepala PPKD.

Bagian Keempat
**Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang Daerah**

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau Pejabat Pengguna Anggaran berhalangan, baik berhalangan tetap maupun sementara, Bupati menunjuk Pejabat lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengguna Anggaran.

- (3) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja 1 (satu) tingkat di bawahnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
- (2) Penetapan Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/barang daerah.
- (5) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) PPTK dapat dibantu oleh pelaksana teknis dan pelaksana administrasi yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atas usulan PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan verifikasi SPP dn SPJ;
 - menyiapkan SPM;
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - melaksanakan akuntansi SKPD;
 - menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang keuangan daerah pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum APBD

Pasal 14

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada RKPD dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 16

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.

- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Jumlah pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 17

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 18

- (1) Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menurut objek pendapatan meliputi:
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf d meliputi:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - f. komisi, potongan, denda, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah;
 - g. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak;
 - l. pendapatan denda retribusi;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (5) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dana bagi hasil terdiri dari pajak dan bukan pajak;
 - b. dana alokasi umum; dan

- c. dana alokasi khusus.
- (6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi:
 - a. hibah, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada daerah;
 - d. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya; dan
 - e. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 19

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menurut:
 - a. organisasi;
 - b. fungsi;
 - c. program dan kegiatan; dan
 - d. jenis belanja.
- (3) Klasifikasi Belanja menurut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Daerah.

- (4) Klasifikasi Belanja menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf a terdiri atas belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (6) Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- pelayanan umum;
 - ketertiban dan ketentraman;
 - ekonomi;
 - lingkungan hidup;
 - perumahan dan fasilitas umum;
 - kesehatan;
 - pariwisata dan budaya;
 - pendidikan; dan
 - perlindungan sosial.
- (7) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (8) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas:
- belanja tidak langsung; dan
 - belanja langsung.
- (9) Klasifikasi jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja modal;
 - bunga;
 - subsidi;
 - hibah;
 - bantuan sosial;
 - belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

i. belanja tidak terduga.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. SILPA tahun anggaran yang lalu;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang;
 - d. pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (5) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang bersifat indikatif sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD.

Pasal 23

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PPAS dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PPAS sebagai landasan Penyusunan RAPBD tahun berikutnya kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (6) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya serta memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.
- (7) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- (8) Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) KUA serta PPAS yang telah disepakati masing-masing, dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 25

- (1) TAPD berdasarkan nota kesepakatan menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi anggaran plafon sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 26

- (1) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

- (2) Penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Pasal 27

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.
- (2) Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (3) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- (4) RKA-SKPKD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (5) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi belanja hibah belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dan;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Kelima

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 29

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (3) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (4) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD berikut dokumen pendukungnya.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai Nota Keuangan.

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda Tentang APBD

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung lainnya paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama.
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (4) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4), dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 31

- (1) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

- (3) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (4) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi untuk belanja yang bersifat tetap yaitu:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Layanan jasa; dan
 - c. Keperluan kantor sehari-hari.
- (6) Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak di luar kendali pemerintah daerah.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dievaluasi dan memperoleh pengesahan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 32

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 33

- (1) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.

- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah mengenai APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 35

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan Belanja Daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 36

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD secara lengkap dengan merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD, serta pendapatan yang diperkirakan dapat direalisasikan, disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD juga harus menyusun rancangan anggaran kas SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (4) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (5) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

- (6) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (7) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD dan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (9) DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah, BPK, dan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 37

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.
- (4) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dana atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan penerimaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 38

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat langsung dipergunakan untuk pengeluaran.
- (2) Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetorkan ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris barang milik daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan dilakukan dengan membebankan pada penerimaan yang berkenaan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (4) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 39

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, dan/atau DPA-SKPD, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD
- (6) Pembayaran atas beban APBD berdasarkan DPA-PPKD untuk belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dilaksanakan oleh SKPD teknis dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Pengeluaran kas tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 40

- (1) Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (5) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (7) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening giro untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 41

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan setelah jumlahnya mencukupi dan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD/BUD.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai perjanjian dan dibukukan dalam nilai rupiah.
- (6) Penerimaan atas penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan didasarkan sesuai bukti penerimaan yang sah dan penjualan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- (8) Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (9) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8), adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan PPKD dan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) PPKD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan telah selesai menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya seluruh SKPD, dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk dibahas bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan APBD

Pasal 43

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kua;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (5) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- (6) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.
- (2) Apabila Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, maka berlaku pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Perda tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan Perda tentang perubahan APBD dan selanjutnya Bupati bersama DPRD mencabut Perda tentang Perubahan APBD.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 46

- (1) Untuk pelaksanaan APBD Bupati menetapkan:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
 - f. Bendahara Pengeluaran Khusus yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu khusus SKPD; dan
 - h. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

- e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan pada SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara sesuai kebutuhan.

Pasal 48

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD, berdasarkan dokumen DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 49

- (1) Penyetoran penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah pada bank yang ditunjuk dilakukan dengan uang tunai dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit;
- (2) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja;
- (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD untuk disahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dimaksud;
- (5) Tata cara penatausahaan bendahara penerimaan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 50

- (1) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran serta penerimaan yang menjadi kewenangannya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk disahkan.
- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS melalui PPK-SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai SKPD berkenaan.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS melalui PPK-SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima tagihan dari pihak ketiga dengan persetujuan PPTK.
- (4) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang pembayaran tersebut kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-LS.
- (5) Bendahara pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-UP/TU kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan 1 (satu) bulan, dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan.
- (6) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP/TU.
- (7) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU melalui PPK-SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk keperluan penggantian uang persediaan dengan dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan yang telah digunakan.
- (8) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan.
- (9) Pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran menerbitkan SPM atas SPP yang diterima dari bendahara pengeluaran paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPP tersebut diterima.

- (10) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak permintaan penerbitan SPM, maka SPP dikembalikan kepada bendahara pengeluaran paling lama 1 (satu) hari kerja setelah SPP tersebut diterima.
- (11) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPM tersebut diterima.
- (12) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran, SPM dikembalikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lama 1 (satu) hari kerja setelah SPM tersebut diterima.
- (13) Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan serta mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah memuat peraturan tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prinsip penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.
- (5) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- (6) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah, paling sedikit meliputi:
- prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - prosedur akuntansi aset; dan
 - prosedur akuntansi selain kas.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 52

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja serta penyusunan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - laporan realisasi anggaran;
 - neraca; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.
- (6) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - laporan realisasi anggaran;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (6), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah
- (8) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 53

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), disampaikan oleh Bupati setelah mendapat reviu dari aparat pengawas internal daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dan dana pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada APBD

BAB X

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 55

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit dalam Perda tentang APBD dan ditutup dengan pembiayaan netto.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun berkenaan.
- (3) Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman; dan
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 56

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Daerah, pemberian pinjaman, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 57

- (1) PPKD selaku BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
- (2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank sehat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari, dan saldo rekening penerimaan daerah setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Rekening pengeluaran diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah, dan disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- (6) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank, dan bunga atau jasa giro tersebut merupakan pendapatan asli daerah.
- (7) Biaya sehubungan dengan pelayanan dari bank umum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 59

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan, dan;
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian ketiga

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 60

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola piutang daerah dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah dapat diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila mengenai piutang pemerintah daerah, maka ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bagian Keempat

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 62

- (1) Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka panjang, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Investasi jangka panjang, terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Pasal 63

Pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran
- (2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
- (4) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD selaku BUD, dan dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Hasil bunga dan/deviden dari penyimpanan dalam rekening dana cadangan dan portofolio menambah nilai dana cadangan berkenaan.
- (6) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

- d. Surat Utang Negara (SUN); dan
- e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Bagian Keenam

Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 65

- (1) Bupati dapat mengadakan pinjaman daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (4) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan oleh ketentuan lain oleh Undang-Undang.
- (5) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tertunda apabila yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 66

Pinjaman daerah dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank, dan
- e. masyarakat.

Pasal 67

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan memperoleh Pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (3) Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi Daerah yang akan diterbitkan.
- (4) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok obligasi yang telah jatuh tempo.

BAB XII

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 68

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan di daerah terdiri dari:

- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersifat wajib dan pilihan;
- b. pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan menurut tugas pembantuan; dan
- c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan atas pinjaman dan/atau hibah.

Pasal 69

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah

untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 70

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Ekstern

Pasal 71

- 1) Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada DPRD dan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 72

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian internal mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah.

- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (4) Kepala SKPD segera melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati untuk dilaksanakan pengawasannya melalui mekanisme Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.
- (5) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui dan kepada yang bersangkutan segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (6) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah maka Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam sistem prosedur berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (8) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk:
- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
 - b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan/atau negara pada umumnya.
- (4) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.

- (5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati.
- (7) Pembentukan BLUD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 76

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLUD.
- (4) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLUD.
- (5) BLUD dapat memperoleh hibah, sumbangan dari masyarakat dan/atau badan lain yang merupakan pendapatan bagi BLUD.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.
- (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang yang berkenaan.

BAB XV

PENATAUSAHAAN PENDANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 78

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada lingkungan Pemerintah Desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di pemerintah desa.
- (2) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan pemerintah desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pasal 79

- (1) PPTK pada Kantor Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagai penanggungjawab Kegiatan menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Desa pada kantor pemerintah desa berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Bendahara pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada Kepala Desa berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada Kuasa BUD Kabupaten.
- (4) Kuasa BUD Kabupaten meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh Kepala Desa berkenaan untuk menerbitkan SP2D.

Pasal 80

Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan kabupaten di desa di atur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 81

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juni 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010
NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu perlu ditetapkan pokok-pokok yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya sistem pengelolaan keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Aspek pengelolaan keuangan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur secara khusus pada BAB VIII Keuangan Daerah pasal 155 sampai dengan pasal 194. Disamping itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melalui pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan Daerah yang

lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat yang berkembang.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyusun pokokpokok pengelolaan keuangan Daerah bagi setiap Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan mem peroleh dana perimbangan dari pemerintah dan berapa.

Besar kemampuan Daerah dapat menunjang kebutuhan Daerah, tetapi harus juga diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih rasional, adil, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Daerah ini memuat landasan pokok mengenai penataan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang materinya terdiri dari : Ketentuan Umum, Asas Umum dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD, Kekayaan dan Kewajiban, Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah secara rind dan operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai pedoman agar mekanisme pengelolaan keuangan Daerah yang mencakup Perencanaan dan Pengang garan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berjalan

dengan baik taat asas dan taat aturan sesuai dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas berbagai Peraturan Perundang-undangan_tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

- Tertib bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang, maksimum dengan masukan tertentu.
- Ekonomis, merupakan perolehan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- Efektif, merupakan pencapaian hasil laporan dengan target yang telah ditetapkan.
- Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.
- Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.
- Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

yang dimaksud dengan koordinator, adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah termasuk pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Bendahara Pengeluaran termasuk Bendahara Pengeluaran Khusus yang mengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPKD/SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen perencanaan Daerah lainnya diantaranya adalah RPJP, RKP, RPJM, Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, RUTR, RDTR, RTRW, RPJMD, RPJPD dan Renstra.

Ayat (3)

- Fungsi otorisasi adalah anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi perencanaan adalah anggaran Daerah menjadi pedoman bagi management dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan adalah anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Fungsi alokasi adalah anggaran Daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- Fungsi stabilisasi adalah anggaran Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ Daerah dalam rangka bagi hasil.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Yang dimaksud analisis standar belanja/biaya adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Yang dimaksud standar satuan harga adalah harga satuan setiap barang/jasa yang berlaku disatu daerah.

Yang dimaksud standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten dan dana otonomi khusus.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pedoman Penyusunan APBD memuat antara lain :

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah Daerah.
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.
- c. Teknis penyusunan APBD.
- d. Hal-hal khusus lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pa

Yang dimaksud analisis standar belanja/biaya adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Yang dimaksud standar satuan harga adalah harga satuan setiap barang/jasa yang berlaku disatu daerah.

Yang dimaksud standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pembahasan oleh TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :

- a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA- SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya.
- b. Keseuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga.
- c. Kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kerja , indicator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal.
- d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan
- e. Sinkronasi program dan kegiatan antar RKA – SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
- b. Untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
- c. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam pasal ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan public dan aparatur serta meneliti sejauh mana APBD Kabupaten Bandung Barat bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti – bukti yang sah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemerintahan pendanaan pelayanan dasar

Ayat (4)

Yang dimaksud berdasarkan DPA-SKPD dalam ayat ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya misalnya DAK. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan pengangkatan pegawai.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kebijakan akuntansi antara lain meliputi :

- a. Pengakuan pendapatan;
- b. Pengakuan belanja
- c. Prinsip – prinsip penyusunan laporan;
- d. Investasi;

- e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. Kontrak – kontrak konstruksi;
- g. Kebijakan Kapitalisasi belanja;
- h. Kemitraan dengan pihak ketiga
- i. Biaya dengan pihak ketiga;
- j. Biaya penelitian dan pengembangan;
- k. Persediaan baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- l. Dana cadangan; dan
- m. Penjabaran mata uang asing

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumber daya antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang member manfaat ekonomi/sosial dimasa depan.

Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah daerah.

Yang dimaksud perhitungan yaitu antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Defoisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutupi jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya.

Pasal 56

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen

lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan / pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintahan dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Huruf b

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerah.

Pasal 66

Ayat (1)

Penertiban obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud pengawasan dalam pasal ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 75

Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pasal ini meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program kegiatan BLUD.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas